



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Baznas dan Kepala BPJPH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 14 Juni 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi kinerja dan program Tahun 2021 2. Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 44 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Ketua Baznas Beserta Jajaran. 4. Kepala BPJPH Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan agenda: **Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2021 dan Isu-Isu Aktual Lainnya**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami capaian kinerja dan program BPJPH Kementerian Agama RI dan BAZNAS tahun 2021, dengan rincian:
 - a. Realisasi anggaran BPJPH Kementerian Agama RI hingga 11 Juni 2021 sebesar Rp14.729.656.000 (*empat belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) atau 17.49 % dari pagu anggaran sebesar Rp84.229.839.000 (*delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - b. Pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) nasional, berdasarkan data 52.6% yang masuk hingga 11 Juni 2021, mencapai total sebesar Rp600.781.737.334 (*enam ratus miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) dan penyaluran ZIS-DSKL nasional, berdasarkan data 36.2% yang masuk hingga 11 Juni 2021, mencapai total sebesar Rp298.915.082.494 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong BPJPH Kementerian Agama RI dan BAZNAS untuk meningkatkan capaian kinerja dan programnya tahun 2021 seoptimal mungkin.

2. Komisi VIII DPR RI meminta BPJPH Kementerian Agama RI dan BAZNAS agar dalam meningkatkan capaian kinerja dan program tahun 2021 menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi anggaran BPJPH melalui percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal yang belum selesai dan hambatan lainnya.

- b. Mensosialisasikan secara intensif mekanisme sertifikasi halal yang mudah dan cepat untuk produk hasil usaha mikro dan kecil.
 - c. Mendukung pembentukan lembaga perwakilan BPJPH di daerah sehingga proses sertifikasi halal berjalan secara mudah, efektif dan efisien.
 - d. Menyusun dan mensosialisasikan kriteria Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mudah, transparan, dan akuntabel.
 - e. Mensinergikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program-program BAZNAS yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan kementerian/lembaga yang terkait.
 - f. Memperluas sasaran penerima manfaat program BAZNAS kepada seluruh mustahik di seluruh Indonesia bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
 - g. Meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL melalui peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
 - h. Mengupayakan regulasi yang memberikan insentif kepada pembayar zakat (muzaki) dengan menjadikan nilai 2,5% zakat dapat menjadi pengurang prosentase pajak perorangan atau perusahaan melalui peningkatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI.
 - i. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara BPJPH Kementerian Agama RI, BAZNAS dengan Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung BAZNAS untuk mengakselerasi Peraturan Presiden terkait pengumpulan zakat di lingkungan ASN, TNI-POLRI, dan BUMN melalui BAZNAS.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si